

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1993) memberikan dasar teoritis penting dalam memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat memperbaiki mutu layanan publik dan kesejahteraan warga di tingkat lokal. Oates (1993) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Alasannya, pemda akan lebih efisien dalam memproduksi serta menyediakan barang publik. Kebijakan yang ditetapkan pada level pemda (kabupaten/kota) umumnya lebih sesuai dengan beragamnya kebutuhan lokal sehingga efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya pun meningkat.

Oates (1993) menegaskan bahwa barang publik lokal lebih efektif dikelola oleh pemerintah daerah karena mereka memahami kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Hal ini membuat desentralisasi fiskal memiliki potensi untuk meningkat dua unsur utama dalam pengukuran IPM berupa kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Secara formal, pengakuan Indonesia terhadap desentralisasi fiskal telah diamanatkan sejak awal dalam Pasal 18A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Fondasi ini diperkuat secara revolusioner

melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Regulasi terbaru ini mendesain ulang arsitektur fiskal nasional dengan pilar Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional guna meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh wewenang mengelola pajak daerah sehingga kapasitas fiskal untuk membiayai layanan publik pun bertambah. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara langsung berkontribusi terhadap komponen utama Indeks Pembangunan Manusia, yaitu indeks pendidikan dan angka harapan hidup. Selain itu, transfer fiskal berupa DAU dan DAK berfungsi dalam pemerataan kapasitas fiskal antar daerah. Pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar merupakan bidang-bidang prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap IPM, dan DAK berkomitmen untuk memberikan subsidi di bidang-bidang tersebut. DAU digunakan untuk menutup defisit anggaran. Di sisi lain, PDRB mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang mendorong peningkatan pendapatan dan standar hidup masyarakat sebagai komponen penting IPM.

Teori desentralisasi fiskal tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga mampu menjelaskan hubungan logis antara pajak daerah, PDRB, DAU dan DAK terhadap IPM. Saragih (2019) menemukan bahwa di seluruh 34 provinsi di Indonesia, IPM dipengaruhi secara positif dan berarti oleh penerimaan pajak daerah, yang merupakan ukuran kemampuan fiskal. Demikian pula, penelitian Hanantoko (2020) di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa variabel fiskal

PAD, DAU, DAK, dan DBH, yang mewakili prinsip-prinsip desentralisasi secara bersamaan memiliki dampak yang cukup kuat terhadap IPM. Temuan-temuan ini secara kolektif mengonfirmasi bahwa teori desentralisasi fiskal memiliki daya penjabar yang kuat dan relevan dalam konteks penelitian ini.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Gagasan pembangunan manusia pertama kali dikemukakan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui *Human Development Report* tahun 1990. Dalam laporan tersebut ditegaskan bahwa manusia merupakan aset utama bangsa, sehingga pembangunan manusia harus diposisikan sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekedar faktor input dalam proses pembangunan. Dengan demikian, perspektif pembangunan manusia menekankan bahwa sasaran pembangunan ialah menghadirkan keadaan yang memungkinkan masyarakat berumur panjang, hidup sehat, dan menjalani kehidupan yang produktif menurut UNDP, 1990 dalam (BPS Kab Kebumen, 2024).

Dalam mengevaluasi kemajuan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan manusia, IPM ialah suatu indikator yang perlu dipertimbangkan. Sebagaimana diungkapkan oleh UNDP, IPM dirancang untuk memperkirakan capaian pembangunan manusia dengan berlandaskan pada serangkaian unsur dasar yang merefleksikan kualitas hidup. Menurut BPS Kab Kebumen (2024), penilaian tersebut didasarkan pada tiga faktor utama: usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan kualitas hidup. IPM berperan sebagai alat komprehensif untuk menilai mutu pembangunan suatu negara karena turut memperhitungkan aspek kesejahteraan manusia di luar pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia termasuk indikator utama untuk menggolongkan tingkat pembangunan suatu wilayah. Indeks ini berperan dalam mengkategorikan suatu negara sebagai negara maju, berkembang, atau tertinggal. Selain itu, IPM juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan ekonomi memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, IPM mencerminkan keterkaitan langsung antara pembangunan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup penduduk.

2.1.3 Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari masyarakat tanpa memberikan imbalan langsung, dan salah satu sumbernya adalah pajak daerah. Dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah dihimpun melalui pajak daerah, yang dipungut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Dengan menggali dan meningkatkan potensi pajak daerah, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ada dua jenis pajak daerah yang diakui oleh undang-undang: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Kategorisasi ini berasal dari badan yang dipercaya untuk bertanggung jawab mengumpulkan dan mengawasi semua bentuk pajak daerah di wilayah, kabupaten, atau kota tertentu.

Ada dua jenis pajak daerah yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berbagai bentuk pajak

provinsi meliputi: pajak rokok, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, biaya perubahan nama kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan bagian dari pajak kabupaten/kota meliputi: pajak hotel, restoran, hiburan, periklanan, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan tanah dan bangunan. Pembagian kewenangan pemungutan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tercermin dalam kategorisasi pajak daerah ini, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Baik dihitung menggunakan dasar harga berlaku maupun harga konstan, data Produk Domestik Regional Bruto merupakan alat penting untuk menganalisis kondisi ekonomi suatu wilayah selama periode waktu tertentu. PDRB ialah jumlah seluruh produk dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah beserta nilai totalnya, atau nilai yang diciptakan oleh seluruh usaha di wilayah tersebut (BPS, 2025).

Cara yang efisien untuk mengkaji perubahan struktur ekonomi adalah PDRB atas dasar harga berlaku, yang menurut (BPS, 2025), mewakili nilai tambah produk dan jasa yang dievaluasi menggunakan harga pada tahun berjalan. Sebaliknya, PDRB dengan harga konstan melacak kemajuan ekonomi dari tiap tahunnya dengan membandingkan harga saat ini dengan harga pada tahun dasar yang telah ditentukan.

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Kuncoro (2004), sebagaimana dikutip dalam Pradana Adiputra *et al.*, (2015), DAU ialah *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal. Alokasi dasar dan kesenjangan fiskal digunakan untuk menentukan distribusi dana ini, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Bratakusumah dan Solihin, 2004 dalam (Pradana Adiputra *et al.*, 2015) menjelaskan bahwa tujuan utama DAU adalah menciptakan pemerataan antardaerah dengan menelaah berbagai aspek, guna mengurangi ketimpangan ekonomi, berbagai faktor seperti luas lahan, jumlah penduduk, potensi lahan, kondisi geografis, dan tingkat pendapatan harus diperhitungkan..

2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, DAK bersumber dari APBN dan disalurkan ke wilayah tertentu guna mendanai urusan daerah yang bersifat khusus. Penentuan penerima DAK didasarkan pada tiga kriteria utama. Pertama, kriteria umum yang mengacu pada kapasitas finansial APBD daerah tersebut. Kedua, kriteria khusus yang merujuk pada regulasi serta karakteristik wilayah. Ketiga, kriteria teknis yang dirumuskan oleh kementerian atau lembaga teknis terkait. Di seluruh negeri, di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, pembangunan fasilitas fisik dan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama dalam pendanaan DAK ini

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Safina Ariesa Putri, Rifki Khoirudin, dan Deyan Haifa Mazaya (2024)	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Pengangguran, Belanja Daerah, dan Pendapatan Daerah	Model Regresi Panel dengan menggunakan Software Stata Jenis Sampel: 10 Provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2022	Pengangguran berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM karena ketika tingkat pengangguran naik, ukuran nilai hidup masyarakat menurun. Belanja daerah tidak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM karena ketika IPM mengalami kenaikan maka belanja daerah juga meningkat. Pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM ketika peningkatan pendapatan daerah akan diikuti naiknya IPM begitu juga sebaliknya.
2	Moch Erik Nugroho dan Ignatia Martha Hendrat (2024)	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: PAD,	Metode regresi linier berganda dengan melakukan uji Best Linier Unbiased Estimation	Secara simultan IPM dipengaruhi oleh PAD, dana perimbangan dan pengeluaran di bidang kesehatan. Namun, secara

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

		Dana Perimbangan, dan Pengeluaran Bidang Kesehatan	(BLUE), dan analisis uji hipotesis. Jenis Sampel: Kabupaten Jombang selama periode 2007-2021	parsial hanya dana perimbangan yang dapat mempengaruhi IPM di Kabupaten Jombang selama periode 2007-2021
3	Christian Thomas Soenarko dan Ignatia Martha Hendrati (2023)	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan, dan Pengeluaran Pendidikan	Model regresi linear berganda Jenis Sampel: Kabupaten Tulungagung pada tahun 2007-2021	Dana Perimbangan dan Pengeluaran Pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM. Berbeda dengan variabel PAD tidak berpengaruh terhadap IPM Kabupaten Tulungagung.
4	Andy Sahat Maasi Sigalingging dan Rijal (2023)	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: PAD dan Dana Perimbangan Variabel Moderasi: Indeks Pembangunan Manusia	<i>Moderated Regression Analysis</i> menggunakan software STATA versi 17 Jenis Sampel: Kota Biak pada tahun 2015-2022	Indeks Pembangunan Manusia hanya memiliki pengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, namun tidak pada variabel Dana Perimbangan
5	Cahya Fahma Arrosyid dan Andy Dwi Bayu Bawono (2023)	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: PAD, DAU, DAK, dan DBH	Metode regresi data panel Jenis Sampel: 34 Provinsi yang menyampaikan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2017-2018	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

6	Ifan Maulana dan Ichsan (2022)	<p>Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel Independen: PDRB, PAD, dan DAU</p>	<p>Metode regresi data panel menggunakan Software Eviews 9</p> <p>Jenis Sampel: Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2021</p>	<p>Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan, PDRB, PAD, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara</p>
7	Martin Tamaro Siburian, Muhammad Agrata Abdullah, dan Amrie Firmansyah (2021)	<p>Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah</p>	<p>Fixed Effect Model (FEM) sebagai model regresi linier berganda</p> <p>Jenis Sampel: Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2018</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi positif terhadap HDI, DBH berpengaruh negatif terhadap HDI, DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM, DAK berpengaruh positif terhadap IPM, dan besaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap IPM.</p>
8	Rizki Kurniasari (2021)	<p>Variabel Dependen: Indeks</p>	<p>Analisis regresi linier berganda SPSS versi 23</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara</p>

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

		<p>Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel Independen: PAD dan Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Inverting: Belanja Modal</p>	<p>Jenis Sampel: 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2019</p>	<p>langsung maupun tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap IPM, DAU secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap IPM. Selanjutnya DAK tidak memiliki pengaruh terhadap IPM, namun memiliki pengaruh secara tidak langsung melalui belanja modal terhadap IPM.</p>
9	Evi Sulastri dan Efendri (2021)	<p>Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Variabel Independen: PAD, DAU, DAK, dan DBH</p>	<p>Metode regresi linier berganda dan uji statistik deskriptif</p> <p>Jenis Sampel: kabupaten/kota di seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>DBH tidak tidak berpengaruh terhadap IPM</p> <p>PAD, DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap IPM</p>

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

10	Rezha Hanantoko (2020)	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal	Metode data panel Jenis Sampel: provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2018	Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU, DAK, dan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap IPM
11	Arfah Habib Saragih (2019)	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Penerimaan Pajak Daerah	Regresi data panel dengan metode random effect. Jenis Sampel: 34 Provinsi di Indonesia pada periode 2013-2016	Penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.
12	Ari Nurul Fatimah, Diah Agustina Prihastiwati, dan Vita Irawati (2019)	Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PDRB	Regresi linier berganda Jenis Sampel: 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015-2019	Pajak daerah, retribusi daerah, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.
13	Pieter Noisirifan de Fretes (2017)	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Dana Perimbangan, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi	Regresi linier berganda Jenis Sampel: Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2007-2015	Rasio DAK dan PAD terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM, sementara variabel DAU memiliki dampak negatif yang signifikan. Rasio DBH terhadap belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang tidak

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

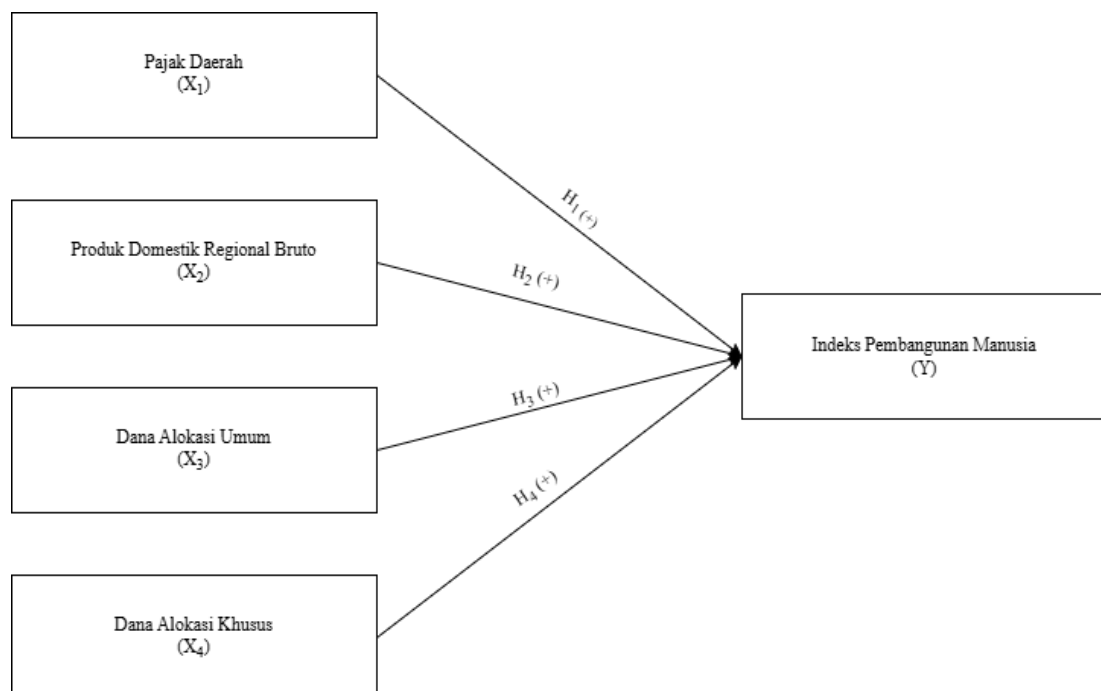
				memiliki dampak signifikan terhadap IPM.
14	Ayu Kurnia Sari, Hendra Saputra, dan Andysah Putera Utama Siahaan (2017)	Variabel Dependen: <i>Human Development Index</i> Variabel Independen: <i>Effect of Fiscal Independence and Local Revenue</i>	Metode analisis model regresi Jenis Sampel: 22 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2005-2009	Pengujian hipotesis Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan variabel perantara menyatakan bahwa pendapatan asli memiliki pengaruh positif langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia tanpa melalui Belanja Modal di kabupaten/kota Sumatera Utara. Pengujian hipotesis dengan menggunakan variabel perantara menyatakan bahwa tingkat kemandirian fiskal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di kabupaten/kota Sumatera Utara.
15	I Made Pradana Adiputra, Ni Kadek Desi Dwiyantari, dan Dewa Kadek Darmada (2015)	Variabel Dependen: Kualitas Pembangunan Manusia Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA	Analisis jalur menggunakan SPSS versi 19. Jenis Sampel: 54 sampel yang terdiri dari LRA dan IPM 8 kabupaten dan 1 kota di Bali	PAD dan SiLPA berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia. Sedangkan pengaruh secara tidak langsung, PAD, DAU, DAK

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

		Variabel Intervening: Alokasi Belanja Modal	pada tahun 2008-2013	dan DBH tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal.
--	--	---	----------------------	--

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menjelaskan hubungan teoritis dan empiris antara pajak daerah, PDRB, DAU, dan DAK terhadap IPM dengan berlandaskan teori desentralisasi fiskal Oates (1993). Teori tersebut menekankan bahwa kewenangan fiskal daerah, melalui pajak dan transfer pusat, meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan publik yang berpengaruh pada pembangunan manusia. Hubungan fungsional antarvariabel didalam studi ini secara operasional dijabarkan lewat bagian ini yang terlihat didalam bagan ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Guna membiayai operasional dan pertumbuhan pemerintah daerah, PAD mengandalkan berbagai sumber, dengan salah satu yang paling penting yakni pajak daerah. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal Oates (1993), bertambahnya penerimaan pajak daerah akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik bermutu, yang ujungnya turut menaikkan IPM. Ketika penerimaan pajak daerah meningkat, kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial turut meningkat. Peningkatan layanan di dua bidang tersebut secara langsung mendorong kenaikan indeks pendidikan serta indeks kesehatan yang keduanya merupakan komponen pembentuk IPM.

Riset empiri Saragih (2019) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di 34 provinsi di Indonesia. Hasil yang sama diperlihatkan oleh Cahya Fahma Arrosyid dan Andy Dwi Bayu Bawono (2023) yang menegaskan bahwa PAD sebagai komponen pajak daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Informasi ini memungkinkan penulis untuk menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap IPM.

2.4.2 Pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah ialah indikator potensi ekonomi wilayah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Kenaikan PDRB menandakan pertumbuhan ekonomi, yang secara tidak langsung dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan daya beli penduduk dan penciptaan lebih banyak peluang kerja. Berdasarkan teori pertumbuhan endogen dari Robert Lucas (1988, dalam Juhro & Trisnanto, 2018), peningkatan ekonomi suatu wilayah akan menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap dimensi kesejahteraan manusia, sebab pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan masyarakat, dan memperluas basis pajak yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan publik. Dalam konteks IPM, peningkatan PDRB per kapita secara langsung mempengaruhi komponen standar hidup layak melalui peningkatan pengeluaran per kapita riil masyarakat, sekaligus secara tidak langsung mendorong peningkatan komponen pendidikan dan kesehatan melalui perluasan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut.

Hubungan ini juga relevan dengan teori desentralisasi fiskal Oates (1993), daerah dengan PDRB yang tinggi umumnya memiliki basis pajak yang lebih kuat, sehingga kapasitas fiskal untuk mendanai pembangunan manusia pun lebih besar. PDRB tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap IPM melalui peningkatan daya beli masyarakat, tetapi juga secara tidak langsung melalui penguatan kemampuan fiskal pemerintah daerah..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Provinsi Sumatra Utara oleh Ifan Maulana dan Ichsan (2022), PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap IPM. Ari Nurul Fatimah, Diah Agustina Prihastiwi, dan Vita Irawati (2019) juga mencatat hasil serupa, yaitu bahwa PDRB memiliki hubungan

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap IPM.

2.4.3 Pengaruh DAU terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah instrumen fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tanpa peruntukan khusus (*block grant*) dengan sasaran utama pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. DAU ialah mekanisme pemerataan dalam kerangka desentralisasi fiskal Oates (1993) yang memastikan bahwa daerah-daerah dengan kapasitas terbatas tetap dapat menyediakan layanan publik dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang. Tanpa transfer semacam ini, daerah-daerah yang miskin akan semakin tertinggal dalam penyediaan layanan publik, yang pada akhirnya memperparah kesenjangan IPM antardaerah.

Penelitian oleh Evi Sulastri dan Efendri (2021) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di provinsi-provinsi di Kalimantan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan transfer DAU tidak selalu diikuti oleh efektivitas penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya, Moch Erik Nugroho dan Ignatia Martha Hendrat (2024) serta Maulana dan Ichsan (2022) menemukan bahwa secara simultan DAU bersama variabel fiskal lainnya berpengaruh signifikan terhadap IPM. Mengacu temuan tersebut, bisa dirumuskan hipotesis berikut:

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap IPM.

2.4.4 Pengaruh DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai karakteristik yang berbeda dari DAU karena bersifat *specific grant*, yaitu transfer yang peruntukannya telah ditetapkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas nasional di sektor tertentu. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar merupakan bidang-bidang utama yang menjadi fokus perbaikan DAK. Ketiga faktor ini memiliki dampak langsung terhadap komponen-komponen IPM. Dengan demikian, dari seluruh instrumen fiskal yang dikaji didalam studi ini, DAK memiliki jalur kausalitas yang paling langsung terhadap IPM karena dana tersebut memang diarahkan untuk mendanai kegiatan yang secara denitif berkaitan dengan pembentukan IPM.

Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal Oates (1993), DAK mencerminkan peran pemerintah pusat dalam mengarahkan kebijakan sektoral yang dianggap memiliki eksternalitas positif pada skala nasional. Pemerintah pusat mengakui bahwa pendidikan dan kesehatan adalah barang publik yang manfaatnya melampaui batas administratif daerah, sehingga perlu mendapat dukungan fiskal khusus yang terstandarisasi. Hal ini menyatakan bahwa semakin besar DAK yang diterima suatu daerah, semakin besar kemampuannya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan IPM.

Penelitian Martin Tamaro Siburian, Muhammad Agrata Abdullah, dan Amrie Firmansyah (2021) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM, terutama melalui peningkatan investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, Evi Sulastri dan Efendri (2021) menemukan hasil yang

berbeda, yaitu DAK berpengaruh negatif terhadap IPM karena kemungkinan penggunaan dana yang kurang efisien. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap IPM.

2.4.5 Pengaruh Pajak Daerah, PDRB, DAU, dan DAK secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Secara simultan, keempat variabel tersebut membentuk suatu sistem fiskal daerah yang saling melengkapi dan secara bersama-sama menentukan kapasitas fiskal daerah dalam mendanai pembangunan manusia. Teori desentralisasi fiskal Oates (1993) secara implisit menegaskan bahwa efektivitas pembangunan manusia tidak bergantung pada satu sumber fiskal saja, melainkan pada kombinasi harmonis antara penerimaan mandiri daerah dan dukungan transfer pusat. Ketika keempat komponen ini berjalan secara sinergis, kapasitas fiskal daerah menjadi lebih kuat dan stabil, sehingga mampu membiayai layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rezha Hanantoko (2020) dan Evi Sulastri & Efendri (2021), faktor-faktor fiskal seperti PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesisnya dirumuskan yakni:

H5: Pajak Daerah, PDRB, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap IPM.